

# RENJA

## RENCANA KERJA

**Tahun 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, masing-masing Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA-PD). RENJA sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) PD disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

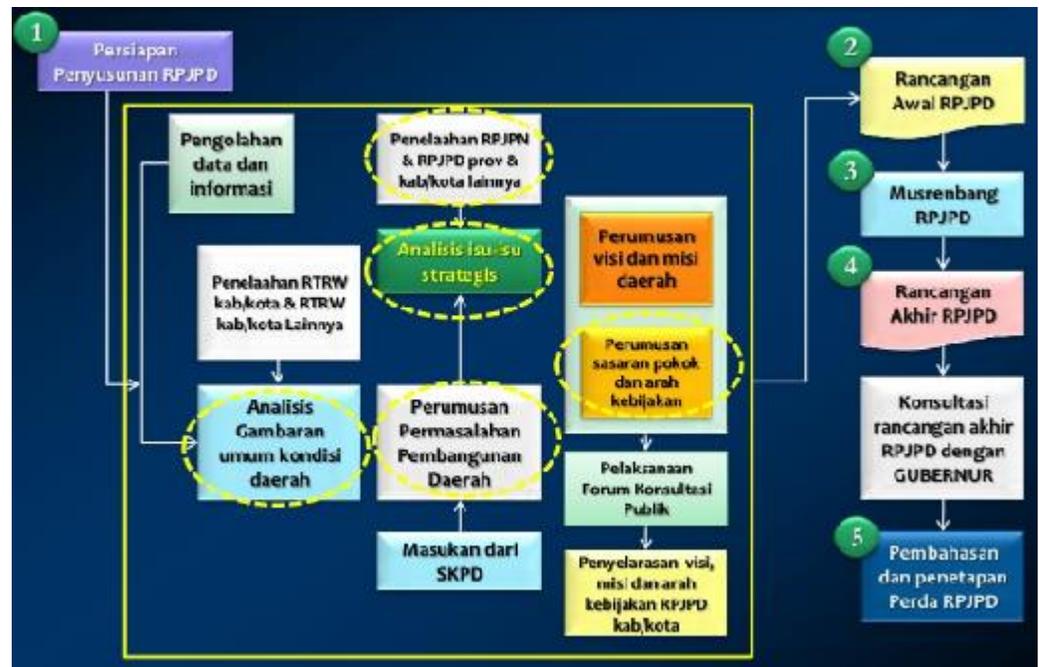
Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Gambar 1.1

Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota



Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPMPT Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2026;

3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 DPMPT Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah,
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021.
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan DPMPT dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra DPMPT Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,**  
berisi tentang : Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat  
Daerah selama 5 tahun

**BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPT Tahun 2020**

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun  $n-2=2021-2=2020$ ) berdasarkan target indikator program tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
  - Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
  - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
  - Peningkatan SDM/Bimtek Aparatur
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan Dokumen LKjIP
  - Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra
7. Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
  - Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang
  - Penyusunan Input Data dan Pemetaan Perizinan Pemanfaatan Ruang
8. Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
  - Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
  - Peningkatan Pelayanan Keliling dan Pelayanan Reguler

**b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
  
- 3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Penyelenggaraan Promosi Investasi
- 4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan
- 5. Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
  - Survey Kepuasan Konsumen Bidang Pelayanan Perizinan
- 6. Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
  - Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi
  - Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Perizinan dan Investasi
- 7. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi
  - Peningkatan Penyampaian LKPM

**c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
2. Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
3. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha

**Tabel 2.2**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2020**  
**KOTA BALIKPAPAN**

Nama SKPD : DPMPT

Lembar : 1

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target Kinerja RENSTRA PD Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Kondisi awal 85% dan pencapaian kondisi akhir 90%)	%	5%	3%	1%	0.28%	28	1%	4.28%	85.60%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah resi pengiriman surat dan penyediaan materai dan benda pos untuk kegiatan administrasi (lembar)	Lembar	3883	1370	1000	850	85	1000	3220	83%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar 1 Tahun (jenis)	Jenis	15	108	3	3	100	3	114	760%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 (unit)	Unit	85	39	18	18	100	18	75	88%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis bahan dan peralatan untuk Kebersihan kantor (jenis)	Jenis	9	4	2	2	100	2	8	89%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun	Jenis	296	209	60	53	88	60	322	109%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)	Jenis	15	12	3	3	100	3	18	120%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang diadakan per tahun (jenis)	Jenis	39	9	9	9	100	9	27	69%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/Snack /Baunket untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)	Orang	134590	63092	30000	7689	26	30000	100781	75%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah (Orang)	Orang	250	248	80	54	68	90	392	157%
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah 1 tahun (orang)	Jumlah THL dan Naban	181	127	37	37	100	37	201	111%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target Kinerja RENSTRA PD Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	%	5.00%	0.02	1%	0.44%	44	1%	3.44%	0.86%
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan	Unit	19		8	8	100	6	14	74%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang diadakan	Jenis	11	10	4	1	0	3	14	127%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan yang diadakan	Jenis	39	29	10	10	100	10	49	126%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan Pembelian BBM Genset	Unit	97	13	24	23	95.83	29	65	67%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang dipelihara	Jenis	19	6	4	2	50	4	12	63%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan yang dipelihara	Jenis	20	8	4	3	75	4	15	75%
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah PNS	0		0%	0.00%	0	0	0	0%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur (Jumlah Stel Pakaian PNS)	Jumlah PNS	0		0		0	0	0	0%
	<b>Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur</b>	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek untuk peningkatan kapasitas SDM	Jumlah PNS	0		0%	0.00%	0	0	0	0%
	Peningkatan SDM/Bimtek Aparatur	Jumlah PNS Yang mengikuti Bimtek	Jumlah PNS	0		0		0	0	0	0%
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dan daerah	Persen	500				0	0	0	0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dicetak (Buku)	Buku	50				0	0	0	0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dicetak (Buku)	Buku	25				0	0	0	0%
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase Capaian Kinerja Dan Presentase Realisasi Anggaran	Persen	100				0	0	0	0%
	Penyusunan Dokumen LKjIP	Jumlah Dokumen LKjIP yang dicetak (Buku)	Buku	50				0	0	0	0%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target Kinerja RENSTRA PD Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Persentase Rencana Investor PMA Terhadap PMDN Swasta Nasional	Persen	25	144.31	5%	14.98%	299.6	25%	144.71	579%
	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Frekwensi Pameran Promosi Investasi Dalam Negeri	Kali	27	4	2	2	0	2	8	30%
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Rencana Investasi	Triliun	29.24	9.48	6.150	3.4442	56	6.50	19.42	66%
	Penyediaan Profil Investasi	Tersedianya sarana Untuk Promosi (Leaflet, Brosur, Video dan Videotron) (Paket)	Dokumen	2	1.00	0		0	1	2	100%
	<b>Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan</b>	SKM Pelayanan Perizinan	Point	1.31	0.1	0.1	0.30	300	0.10	0.5	38%
	Survey Kepuasan Konsumen Bidang Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Kali	5	4	1	1	100	1	6	120%
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan	Jumlah Pemohon	13600	6336	2700	2614	97	2800	11750	86%
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha	Jumlah Izin Usaha yang terlaksana	Jumlah Pemohon	147	159	31	66	212.90	31	256	174%
	Penyusunan Input Data dan Pemetaan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Software Pemetaan dan Pemeliharaan Software Perizinan Pemanfaatan Ruang	Paket	10		3		0	4	4	40%
	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan</b>	Persentase Jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	Persen	40	41.25%	5%	14%	280	40%	0.9525	2%
	1. Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	Terlaksananya Pengadaan cetak Leaflet/brosur informasi izin (jumlah), Video Profil (1), Media Display Standar (1)	Jumlah	12500	6	1	1	100	3	10	0%
	2. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Pengembangan dan Pemeliharaan berbasis Software/ Aplikasi	Paket	24	8	6	2	33.33	6	16	67%
	3. Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Perizinan dan Investasi	Tersosialisasinya Perizinan dan Investasi (Media Promosi)	Jenis Promosi	17	9	3	3	6	3	15	88%
		Jumlah Peserta/Undangan/Orang yang disiapkan Makan dan minum pada uji publik	Orang	800	9	3	3	6	3	15	2%
	4. Peningkatan Pelayanan Keliling dan Pelayanan Reguler	Meningkatnya pelayanan perizinan	Kali	192	89	48	21	69	48	158	82%
	<b>Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan</b>	Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal	Unit	674	970	145	732	505	145	1847	274%
	Pembinaan Penanaman Modal	Terselenggaranya Sosialisasi Laporan Penanaman Modal	Kali	8	6	4	4	100	4	14	175%

### 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) merupakan unit penyelenggara pelayanan publik untuk pelayanan penanaman modal dan perizinan di wilayah Kota Balikpapan. Sejak diberlakukannya Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada DPMPT, maka terdapat 80 (delapan puluh) jenis perizinan yang dilayani oleh DPMPT Kota Balikpapan. Selanjutnya, seiring dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, atau lebih banyak dikenal dengan OSS (*Online Single Submission*) terdapat sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Disebutkan dalam PP 24 tahun 2018 jenis perizinan berusahaan terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, namun dalam pengukuran kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPT pada tahun 2019, Bagian Organisasi melakukan survei berdasarkan tiga kelompok besar yaitu pelayanan Perizinan Usaha, pelayanan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), dan Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang. Pertimbangan pelaksanaan survei dengan menggunakan pengelompokan tersebut adalah karena penyelenggaraan pelayanan tersebut yang paling banyak diakses masyarakat. Kedepannya, pengelompokan untuk survei kepuasan masyarakat akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Survei untuk mengukur kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPMPT dilakukan dengan melibatkan 575 responden yang merupakan pengguna layanan DPMPT pada periode bulan Juli–September 2019. Responden tersebut terbagi untuk ketiga kelompok layanan yang diukur. Untuk melihat lebih rinci terhadap identifikasi responden dan nilai perunsur serta indeks masing-masing pelayanan, data akan ditampilkan sebagai berikut:

## 1. Pelayanan Perizinan Usaha

Untuk pengukuran kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan usaha pada tahun 2019 responden yang dilibatkan sebanyak 200 orang. Adapun identifikasi terhadap responden sebagai berikut:

NO	JENIS IDENTIFIKASI	JUMLAH			
1.	Jenis Kelamin	<b>Laki-Laki</b>	103	<b>Perempuan</b>	97
2.	Pendidikan	<b>SD</b>	2	<b>SMP</b>	1
		<b>SMA</b>	64	<b>D1-D3</b>	0
		<b>D4/S1</b>	121	<b>&gt;S2</b>	12
3.	Pekerjaan	<b>PNS</b>	3	<b>TNI/POLRI</b>	0
		<b>Peg. Swasta</b>	157	<b>Wiraswasta</b>	28
		<b>Pelajar/ Mahasiswa</b>	0	<b>Lainnya</b>	12
4.	Usia	<b>15-25</b>	19	<b>26-35</b>	94
		<b>36-50</b>	82	<b>&gt;50</b>	5

Hasil pengolahan data terhadap jawaban responden pada kuesioner yang diberikan adalah sebagai berikut:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan
1.	Kejelasan Persyaratan	3.090
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.080
3.	Kesesuaian Waktu Pelayanan	3.130
4.	Komitmen Anti Pungli	3.375
5.	Kesesuaian Produk Layanan	3.070
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.095
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3.075
8.	Respon Terhadap Pengaduan	3.085
9.	Fasilitas Sarana dan Prasarana	3.310
10.	Sistem Antrean	3.235
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		<b>78.86</b>

Berdasarkan hasil pengolahan data isian responden, indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan Izin Usaha oleh DPMPT pada tahun 2019 adalah **78,86** (tujuh puluh delapan koma delapan puluh enam) dengan mutu pelayanan **B** atau kinerja unit pelayanan Baik. Hasil tersebut lebih rendah daripada indeks pada tahun 2018 yaitu 81,00.

Rata-rata tertinggi dari 10 unsur pelayanan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha oleh DPMPT terdapat pada unsur Komitmen Anti Pungli dengan nilai 3,375. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada unsur Kesesuaian Produk Layanan dengan nilai rata-rata 3,070.

## 2. Pelayanan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

Untuk pengukuran kepuasan masyarakat atas pelayanan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) pada tahun 2019 responden yang dilibatkan sebanyak 150 orang. Adapun identifikasi terhadap responden sebagai berikut:

NO	JENIS IDENTIFIKASI	JUMLAH			
1.	Jenis Kelamin	<b>Laki-Laki</b>	85	<b>Perempuan</b>	65
2.	Pendidikan	<b>SD</b>	3	<b>SMP</b>	1
		<b>SMA</b>	53	<b>D1-D3</b>	42
		<b>D4/S1</b>	46	<b>&gt;S2</b>	6
3.	Pekerjaan	<b>PNS</b>	4	<b>TNI/POLRI</b>	3
		<b>Peg. Swasta</b>	95	<b>Wiraswasta</b>	30
		<b>Pelajar/ Mahasiswa</b>	0	<b>Lainnya</b>	17
4.	Usia	<b>15-25</b>	14	<b>26-35</b>	58
		<b>36-50</b>	57	<b>&gt;50</b>	21

Hasil pengolahan data terhadap jawaban responden pada kuesioner yang diberikan adalah sebagai berikut:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan
1.	Kejelasan Persyaratan	3.167
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.093
3.	Kesesuaian Waktu Pelayanan	3.167
4.	Kewajaran Biaya/Tarif	3.300
5.	Kesesuaian Produk Layanan	3.053
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.147
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3.120
8.	Respon Terhadap Pengaduan	3.067
9.	Fasilitas Sarana dan Prasarana	3.313
10.	Sistem Antrean	3.240
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		<b>79,17</b>

Berdasarkan hasil pengolahan data isian responden, Indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan IMTN oleh DPMPT pada tahun 2019 adalah **79,17** (tujuh puluh sembilan koma tujuh belas) dengan mutu pelayanan **B** atau kinerja unit pelayanan **Baik**. Hasil tersebut lebih rendah daripada indeks pada tahun 2018 yaitu 80,31.

Rata-rata tertinggi dari 10 unsur pelayanan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan IMTN oleh DPMPT terdapat pada Fasilitas Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,313. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada unsur Kesesuaian Produk Layanan dengan nilai rata-rata 3,053.

### 3. Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang

Untuk pengukuran kepuasan masyarakat atas pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang (Izin Lingkungan dan IMB) pada tahun 2019 responden yang dilibatkan sebanyak 225 orang. Adapun identifikasi terhadap responden sebagai berikut:

NO	JENIS IDENTIFIKASI	JUMLAH			
		1.	Jenis Kelamin	<b>Laki-Laki</b>	131
2.	Pendidikan	<b>SD</b>	1	<b>SMP</b>	0
		<b>SMA</b>	67	<b>D1-D3</b>	61
		<b>D4/S1</b>	73	<b>&gt;S2</b>	23
3.	Pekerjaan	<b>PNS</b>	1	<b>TNI/POLRI</b>	16
		<b>Peg. Swasta</b>	135	<b>Wiraswasta</b>	38
		<b>Pelajar/ Mahasiswa</b>	0	<b>Lainnya</b>	35
4.	Usia	<b>15-25</b>	17	<b>26-35</b>	95
		<b>36-50</b>	79	<b>&gt;50</b>	34

Hasil pengolahan data terhadap jawaban responden pada kuesioner yang diberikan adalah sebagai berikut:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan
1.	Kejelasan Persyaratan	3.173
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.107
3.	Kesesuaian Waktu Pelayanan	3.253
4.	Komitmen Anti Pungli	3.178
5.	Kesesuaian Produk Layanan	3.142
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.147
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3.129
8.	Respon Terhadap Pengaduan	3.107
9.	Fasilitas Sarana dan Prasarana	3.258
10.	Sistem Antrean	3.213
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		<b>79,27</b>

Berdasarkan hasil pengolahan data isian responden, indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang oleh DPMPT pada tahun 2019 adalah **79,27** (tujuh puluh sembilan koma dua puluh tujuh) dengan mutu pelayanan **B** atau kinerja unit pelayanan **Baik**. Hasil tersebut lebih tinggi daripada indeks pada tahun 2018 yaitu 71,90.

Rata-rata tertinggi dari 10 unsur pelayanan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang oleh DPMPT terdapat pada Fasilitas Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,258. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan dan Respon Terhadap Pengaduan dengan nilai rata-rata 3,107.

Dari tiga kelompok pelayanan yang disurvei, indeks kepuasan masyarakat untuk pelayanan Izin Usaha dan pelayanan IMTN mengalami penurunan bila dibandingkan dengan IKM tahun 2018. Meskipun masih dalam mutu pelayanan atau kinerja pelayanan Baik, tetapi perlu segera dilakukan perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan oleh DPMPT.

Beberapa hal yang direkomendasikan sebagai langkah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di DPMPT antara lain:

- a. membangun dan mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan untuk menciptakan pelayanan yang tepat, cepat, sederhana, dan murah untuk semua penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPT;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksana pelayanan mengenai kepatuhan terhadap standar pelayanan, etika pelayanan, dan budaya pelayanan prima;
- c. melakukan pembinaan untuk peningkatan kompetensi petugas pelayanan;
- d. melakukan penguatan komitmen antipungli, antigratifikasi, dan antisuap;
- e. melakukan pengelolaan pengaduan yang lebih responsif dan tertatakelola dengan baik;
- f. menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas pengguna layanan seperti toilet, parkir, dan ruang pelayanan.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berada pada kategori **Baik**. Unsur-unsur pelayanan yang dijadikan parameter dalam survei agar mempertahankan unsur pelayanan yang memiliki rata-rata tinggi dan meningkatkan unsur pelayanan yang memiliki rata-rata rendah.

Diharapkan kedepan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dapat melakukan perbaikan dan peningkatan sesuai rekomendasi yang diberikan serta mengembangkan inovasi pelayanan publik sehingga berkembang menjadi unit pelayanan publik yang sesuai ekspektasi masyarakat dan juga sebagai unit pelayanan publik berprestasi.

Tahun 2016 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan dan Rencana Strategis DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dan berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 telah menyusun Renstra DPMPT Tahun 2016-2021. Berikut akan disampaikan pencapaian kinerja DPMPT Kota Balikpapan

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	5%	5%	5%	5%	37.06%	399.78 %	5%	5%	
2	Nilai Investasi	Nilai Investasi PMA/PMDN	5%	5%	5%	5%	110.04 %	3.75%	5%	5%	
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan perizinan yang Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	5%	5%	5%	5%	1216.23 %	92.70%	5%	5%	
4	perizinan yang Berkelanjutan	Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	80%	85%	90%	95%	100.00 %	100%	95%	100%	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima	Skor SKM Pelayanan Perizinan	88.5	88.6	88.7	88.8	88.356	89.00	88.8	88.9	

:

Berdasarkan data capaian dari tabel diatas dan dikaitkan dengan pengukuran tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021, maka dapat disampaikan bahwa :

#### 1. Sasaran I

- **Indikator I “Persentase Peningkatan Nilai Investasi”**, Untuk Indikator persentase peningkatan nilai investasi realisasi mencapai 399.78% dibandingkan dengan target yaitu sebesar 5% yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2020; kenaikan nilai investasi merupakan pengaruh positif dari makin kondusifnya iklim investasi di Indonesia pada umumnya dan Kota Balikpapan pada khususnya.
  
- **Indikator II “Nilai Investasi PMA/PMDN”** realisasi mencapai 3,75% dari target sebesar 5% yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2020. Pada capaian indikator kinerja utama tersebut dapat diartikan bahwa Investasi yang ditanamkan oleh pihak investor kebanyakan berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA), hal ini disebabkan oleh peningkatan kepatuhan investor dalam negeri untuk melaporkan nilai investasi yang dilakukan secara online pada laman aplikasi : [lkpmonline.go.id](http://lkpmonline.go.id)
  
- **Indikator III “Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima”**, dengan realisasi sebesar 92.70% dari target 5% sehingga capaian sebesar **1854%** Melalui capaian pada tahun 2017-2020 dapat kita tarik kesimpulan bahwa terjadi penurunan dan kemudian kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2018 dan 2019, hal ini disebabkan oleh pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPT Kota Balikpapan sehingga berpengaruh terhadap pelaku usaha yang akan menginput data ataupun melakukan update data pada LKPM Online
  
- **Indikator IV “Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan”**, dengan realisasi sebesar 100% dari target 95% sehingga capaian sebesar **105%** Sasaran II

2. Sasaran II

- **Indikator I “Skor nilai hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan”** , dengan realisasi sebesar 89.00 dari target 88.80 sehingga capaian sebesar **100.23%** Nilai realisasi kepuasan masyarakat pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu rata-rata sebesar 3.56 dengan indek kepuasan sebesar 89.00 sehingga masuk kategori **“Sangat Bagus”**.

Sesuai Visi dan Misi DPMPT Kota Balikpapan yang tertuang dalam Renstra DPMPT Kota Balikpapan tahun 2016-2021 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021
<b>Visi : " TERWUJUDNYA KOTA TUJUAN INVESTASI DENGAN PELAYANAN PRIMA MENUJU KOTA BALIKPAPAN YANG NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN "</b>									
<b>Misi 1 : Mewujudkan Iklim Investasi yang kondusif melalui Pelayanan Perizinan dan Pengelolaan Investasi yang efektif, efisien dan transparan</b>									
	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Rencana Investasi	5%	5%	5%	5%	5%
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi PMA / PMDN Swasta Nasional	5%	10%	15%	20%	25%
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan perizinan yang berkelanjutan	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	Persentase Peningkatan Nilai Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	5%	5%	5%	5%	5%
				Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal	80%	85%	90%	95%	100%
<b>Misi 2 : Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat dan akuntabel</b>									
	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan perizinan	Skor SKM Pelayanan Perizinan	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

### a. Tingkat Pelayanan DPMPT

Secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan DPMPT kota Balikpapan terus menerus mengalami peningkatan, beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan tersebut meliputi :

1. Isu strategis yang dihadapi oleh DPMPT Kota Balikpapan pada tahun 2021 adalah terbentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan sebagai pengembangan yang lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMD dan swasta.
2. Pelayanan Pendampingan OSS (Online Single Submission), Antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan perusahaan melalui OSS, maka diperlukan pendampingan secara intensif untuk melakukan proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Jumlah Izin yang melalui OSS DPMPT Kota Balikpapan adalah sebanyak 33 Jenis Izin dari total 80 Jenis Izin yang dilayani oleh DPMPT Kota Balikpapan);
3. Mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh DPMPT Kota Balikpapan melalui beberapa inovasi pelayanan yaitu : SiJempol (Sistem Jemput Bola), Reklame Prioritas, dan sebagainya;
4. Melakukan sosialisasi pelayanan perizinan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial serta melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung kepada stakeholder terkait;
5. Penyederhanaan proses perizinan;
6. Memfasilitasi investor apabila ada permasalahan dengan masyarakat;
7. Beberapa pelayanan perizinan hanya dilakukan satu pintu DPMPT sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengurusan;
8. Meningkatkan investasi disektor pariwisata dengan kegiatan promosi/pameran baik yang dilaksanakan pada event skala regional maupun event berskala nasional;

9. Meningkatkan sasaran penyelenggaraan promosi investasi dan sosialisasi investasi di Kota Balikpapan.

**b. Permasalahan dan hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPT**

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan DPMPT Kota Balikpapan tersebut, dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan DPMPT Kota Balikpapan antara lain :

1. Masih terdapat beberapa Peraturan Menteri yang belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS);
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait perizinan sehingga jika terjadi masalah teknis perijinan tidak mendapat jawaban yang pasti;
3. Belum terbaharuinya beberapa Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan zaman;
4. Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan tentang perizinan;
5. Belum optimalnya pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin atau izin yang sudah kadaluarsa;
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas sehari-hari tidak maksimal;
7. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi yang memberikan pelayanan perizinan;
8. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi sumber daya manusia di DPMPT melalui pelatihan-pelatihan, kursus-kursus serta diklat fungsional;
9. Belum terkininya atau terbaharuinya Standard Operational Procedure (SOP), Standar Pelayanan Perizinan pada DPMPT dan dokumen Pedoman Pelayanan DPMPT sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

10. Sengketa Kepemilikan tanah sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan Izin Prinsip dan IMTN;
11. RTRW dan RDTR yang belum baku sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan perizinan seperti izin prinsip, IMB dan sebagainya.

**c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi Walikota Balikpapan dan Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011-2016 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah

**“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman di huni dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman”**

yang dirumuskan dalam 5 (lima) misi yakni:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan
3. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

DPMPT Kota Balikpapan sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang investasi dan pelayanan perizinan mempunyai tugas untuk menjabarkan visi, misi dan program-program kepala daerah terpilih tersebut. Misi yang dijalankan DPMPT Kota Balikpapan sesuai dengan Misi pada RPJMD Kota Balikpapan adalah terdapat pada misi ke 4 dan ke 5 yaitu :

- Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif  
Dalam misi ini Pemerintah Kota Balikpapan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau dengan sasaran mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui

strategi menciptakan dan mengembangkan kemudahan berinvestasi dan percepatan pelayanan perizinan

- Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam misi ini pemerintah kota Balikpapan bertujuan mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi pengembangan sistem manajemen di seluruh OPD dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional melalui pengembangan tatakelola pemerintahan yang efektifitas dan efisiensi serta penyederhanaan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perizinan serta standarisasi perizinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha.

#### **d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan**

Disamping permasalahan yang telah disebutkan pada poin b diatas, DPMPT memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal meningkatkan pertumbuhan Investasi di Kota Balikpapan. Dengan terus menggiatkan inovasi, DPMPT memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut :

- **Pengembangan aplikasi SMS GATEWAY dalam SICANTIK** (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) bekerjasama dengan Diskominfo Kota Balikpapan dengan tujuan untuk mempermudah proses penyampaian informasi pelayanan dan transparansi biaya pengurusan izin.
- **Tracking Barcode dalam SICANTIK** (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) sehingga *tracking* proses perizinan dapat diketahui langsung oleh pemohon dengan mudah, cepat dan transparan.
- **Sandi Netter (Penyampaian Salinan Izin Secara Elektronik)** dengan menggunakan aplikasi Camscanner pada handphone yang kemudian di kirim melalui internet ke alamat e-mail Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan pengawasan dan

pengendalian teknis, sehingga proses penyerahan salinan izin dapat dilakukan secara efisien dan efektif;

- **PUAS (Perizinan Untuk Anda Semua)**  
merupakan inovasi yang dilakukan oleh Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari : Buku Pintar Perizinan Pemanfaatan Ruang (Panduan Pengurusan Izin Prinsip, Izin Lokasi dan IPPT), Klinik Perizinan, Template Proposal dan Paket Perizinan;
- **SiJEMPOL (Sistem Jemput Bola Langsung)**  
merupakan Inovasi yang dirilis bulan Februari 2018, dimana Petugas Perijinan DPMPT langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pelayanan perijinan baik perijinan usaha, IMB dan Perijinan lainnya di lokasi yang telah ditetapkan sehingga memperdekat jarak antara masyarakat yang ingin mengurus izin.
- **Akselera**  
Merupakan aplikasi pengendalian proses perizinan yang dapat melaporkan notifikasi tahapan proses izin secara sistematis kepada stakeholder terkait guna mencapai serta meningkatkan kualitas waktu standar pelayanan yang ditetapkan.  
Aplikasi Akselera ini merupakan aplikasi berbasis desktop dengan spesifikasi menggunakan Windows Operating System.
- **Reklame Prioritas**  
Reklame Prioritas merupakan Inovasi layanan perizinan reklame dengan menawarkan kemudahan persyaratan dan waktu penyelesaian yang lebih singkat, yaitu 1 (satu) hari. Inovasi layanan Izin Reklame Prioritas telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala DPMPT Kota Balikpapan Bapak Elvin Junaidi dengan Nomor Surat : 188.46/622/DPMPT Tahun 2019
- Kualitas SDM DPMPT yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan teknologi yang memadai;

Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan Perizinan dan Penanaman Modal baik secara pengendalian dan pengawasan serta evaluasinya

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
DPMPT Kota Balikpapan

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.12.01	<b>Program Administrasi Umum</b>		Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	90%	<b>4,292,500</b>	<b>Program Administrasi Umum</b>		Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	90%	<b>4,292,500</b>	
1.02.12.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	Bpn	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	90	<b>1,835,000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	Bpn	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	90	<b>1,835,000</b>	
1.02.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Bpn	Jumlah Jenis Komponan listrik yang diadakan	9	35,000	Penyediaan Komponen Instalasi	Bpn	Jumlah Jenis Komponan listrik yang diadakan	9	35,000	
1.02.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpn	Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang diadakan	3	1,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpn	Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang diadakan	3	1,000,000	
		Bpn	Jumlah Jenis Peralatan yang diadakan	10			Bpn	Jumlah Jenis Peralatan yang diadakan	10		
1.02.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang diadakan	60	350,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang diadakan	60	350,000	
			Jumlah Peserta/Undangan/Orang yang disiapkan makan dan minum pada pelaksanaan rapat/tamu	30000				Jumlah Peserta/Undangan/Orang yang disiapkan makan dan minum pada pelaksanaan rapat/tamu	30000		
1.02.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3	100,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3	100,000	
1.02.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan keluar daerah (orang)	90	350,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan keluar daerah (orang)	90	350,000	
1.02.12.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bpn	Jumlah Peserta/Undangan/Orang yang disiapkan makan dan minum pada pelaksanaan rapat/tamu	0	-	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bpn	Jumlah Peserta/Undangan/Orang yang disiapkan makan dan minum pada pelaksanaan rapat/tamu	0	-	
1.02.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional atau Lapangan	Bpn	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional atau Lapangan	Bpn	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan	0	-	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.12.01.2.08	<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	Bpn	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	70	<b>1,857,500</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	Bpn	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	70	<b>1,857,500</b>	
1.02.12.01.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpn	Jumlah Perangkat, Materai dan benda pos lainnya	1000	7,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpn	Jumlah Perangkat, Materai dan benda pos lainnya	1000	7,500	
1.02.12.01.02.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bpn	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	3	750,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bpn	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	3	750,000	
1.02.12.01.02.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpn	Jumlah Jenis Alat dan Jasa Kebersihan yang diadakan, Jumlah THL/Naban, Security (Outsourcing)	3 Paket	1,100,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpn	Jumlah Jenis Alat dan Jasa Kebersihan yang diadakan, Jumlah THL/Naban, Security (Outsourcing)	3 Paket	1,100,000	
1.02.12.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bpn	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan Pembelian BBM Genset	29	<b>600,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bpn	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan Pembelian BBM Genset	29	<b>600,000</b>	
1.02.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpn	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diurus perpanjangan STNKnya	18	350,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpn	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diurus perpanjangan STNKnya	18	350,000	
		Bpn	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan Pembelian BBM Genset	29			Bpn	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan Pembelian BBM Genset	29		
1.02.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpn	Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang dipelihara	4	250,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpn	Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang dipelihara	4	250,000	
		Bpn	Jumlah Jenis Alat Peralatan yang dipelihara	4			Bpn	Jumlah Jenis Alat Peralatan yang dipelihara	4		

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.02	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Bpn	Persentase Rencana Investor PMA Terhadap PMDN Swasta Nasional	5%	1,275,000	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Bpn	Persentase Rencana Investor PMA Terhadap PMDN Swasta Nasional	5%	1,275,000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	-	-	-	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	-	-	-	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Bpn	-	-	-	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Bpn	-	-	-	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Bpn	-	-	-	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Bpn	-	-	-	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	1	1,275,000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	1	1,275,000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	Raperwali RUPM Kota Balikpapan	1	300,000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	Raperwali RUPM Kota Balikpapan	1	300,000	
		Bpn	Jumlah Sosialisasi RUPM	4	600,000		Bpn	Jumlah Sosialisasi RUPM	4	600,000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Bpn	Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal	1	375,000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Bpn	Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal	1	375,000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Bpn	Presentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	5%	<b>850,000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Bpn	Presentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	5%	<b>850,000</b>	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	4 Unit Usaha	850,000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	4 Unit Usaha	850,000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Bpn	Jumlah bahan-bahan informasi potensi penanaman modal (Jumlah Jenis Sarana Promosi)	4 Jenis (Video, Pamflet, Banner dan Brosur)	250,000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Bpn	Jumlah bahan-bahan informasi potensi penanaman modal (Jumlah Jenis Sarana Promosi)	4 Jenis (Video, Pamflet, Banner dan Brosur)	250,000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	Jumlah Kegiatan Pameran Penanaman Modal	4 Pameran (Luar Daerah =2; Dalam daerah= 2)	600,000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	Jumlah Kegiatan Pameran Penanaman Modal	4 Pameran (Luar Daerah =2; Dalam daerah= 2)	600,000	
2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Bpn	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3,328 T	<b>300,000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Bpn	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3,328 T	<b>300,000</b>	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal (LPPD)	153 LKPM	300,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal (LPPD)	153 LKPM	300,000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Sosialisasi LKPM (APBD)	2 kali	300,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Sosialisasi LKPM (APBD)	2 kali	300,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Bpn	Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha	10 jenis Perizinan	1,000,000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Bpn	Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha	10 jenis Perizinan	1,000,000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota	Bpn	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	12 bulan	1,000,000	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota	Bpn	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	12 bulan	1,000,000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Bpn	Jumlah Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	3 Jenis	1,000,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Bpn	Jumlah Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	3 Jenis	1,000,000	
		Bpn	Jumlah pengembangan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan	5 Aplikasi			Bpn	Jumlah pengembangan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan	5 Aplikasi		
		Bpn	Jumlah pemeliharaan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan	5 Aplikasi			Bpn	Jumlah pemeliharaan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan	5 Aplikasi		
		Bpn	Jumlah Jenis Media Publikasi Perizinan dan Investasi	3 Jenis			Bpn	Jumlah Jenis Media Publikasi Perizinan dan Investasi	3 Jenis		
		Bpn	Jumlah Jenis Media Publikasi Perizinan dan Investasi	3 Jenis			Bpn	Jumlah Jenis Media Publikasi Perizinan dan Investasi	3 Jenis		

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Bpn	Jumlah semua nilai per indikator kepuasan / Jumlah indikator	89	<b>2,000,000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Bpn	Jumlah semua nilai per indikator kepuasan / Jumlah indikator	89	<b>2,000,000</b>	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	Jumlah perizinan berusaha yang divalidasi	3000	2,000,000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	Jumlah perizinan berusaha yang divalidasi	3000	2,000,000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Bpn	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan (LPPD)	6200	1,000,000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Bpn	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan (LPPD)	6200	1,000,000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Bpn	Jumlah unit usaha yang dipantau	60	500,000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Bpn	Jumlah unit usaha yang dipantau	60	500,000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan		Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	9600	500,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan		Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	9600	500,000	
			Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Kali				Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Kali		
			Jumlah Pelayanan Perizinan keliling	48 kali				Jumlah Pelayanan Perizinan keliling	48 kali		
<b>TOTAL</b>					<b>9,717,500</b>	<b>TOTAL</b>					<b>9,717,500</b>

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Untuk Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) tahun 2022 tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan DPMPT berperan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berhubungan langsung dengan masyarakat dunia usaha.

**Tabel 2.5**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : DPMPT

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>NIHIL</b>					



## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan Tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Jika diselaraskan dengan Sembilan program Presiden yang terpilih yaitu yang disebut Nawa Cita, Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2018 adalah **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**.

Maka dapat disusun hubungan antara Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada Rancangan Awal RKP Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas
<b>1. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata</b>	1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
	2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
	3. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
	4. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
	5. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
	6. Reforma Agraria
	7. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
	8. Percepatan Pembangunan Papua

Dalam Program Prioritas diatas dapat bahwa Program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kota Balikpapan terdapat pada Program Nasional ke-4 yaitu Pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Sedangkan pada pada Program Prioritas pada rancangan awal RKP tahun

2022 termasuk pada program ke-11 yaitu perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

**Tabel 3.1**

Telaahan Misi BKPM dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Misi DPMPTSP Provinsi Kaltim	Misi DPMPT Kota Balikpapan
1 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	1 Meningkatkan perencanaan, kebijakan, promosi, kerjasama, pembinaan, pengendalian pengawasan pelaksanaan dan pelayanan berbasis teknologi informasi terkait penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu yang didukung oleh aparatur, sarana, prasarana dan pelaku usaha yang berkualitas	1 Mewujudkan Iklim Investasi yang kondusif melalui Pelayanan Perizinan dan Pengelolaan Investasi yang efektif, efisien dan transparan
2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing		2 Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat dan akuntabel
3 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional		

Dari tabel diatas maka dapat dilihat keselarasan antara Misi DPMPT Kota Balikpapan dengan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan Misi Kementerian terkait yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPT

Pendekatan Penyusunan RKP 2022 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dengan memperhatikan pada :

- Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
- Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Pendekatan Holistik Tematik berarti pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas DPMPT Kota Balikpapan, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar bidang yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas DPMPT Kota Balikpapan yang didukung oleh antar bidang.

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses.

Jika dihubungkan dengan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas antar bidang lainnya dalam mendukung meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu baik dari segi kemudahan pelayanan, kemudahan akses informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta transparansi dalam hal biaya dan tracking berkas untuk mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan.

Penerapan dalam dokumen Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, pendekatan indikatif dapat diaplikasikan dengan menggabungkan dan mengkombinasikan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai satu sasaran strategis.

Sedangkan pendekatan spasial digunakan saat pembahasan usulan kegiatan dan sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit dari Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang dirasakan baik masyarakat kota Balikpapan pada umumnya maupun masyarakat dunia usaha pada khususnya.

Hubungan yang selaras antara Renja dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DPMPT Tahun 2016-2021 yaitu :

---

Renja DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2022

a. Tujuan :

- 1) Terciptanya pembangunan ekonomi inklusif (pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta perluasan akses dan kesempatan)
- 2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- 2) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah

Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dalam penyusunan Renja DPMPT Kota Balikpapan dapat terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Terciptanya pembangunan ekonomi inklusif (pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta perluasan akses dan kesempatan)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi	5%	<p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b> Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</p> <p><b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b> Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b> Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM & KEGIATAN
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Skor SKM Pelayanan Perizinan	88.9	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>  Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota</p> <p>1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p><b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>  Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pelayanan Perizinan</p> <p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</p>

### 3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPT Tahun 2022, Program dan Kegiatan tahun 2022 disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota Balikpapan;
- b. Berkolerasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan DPMPT

Adapun program / Kegiatan / Sub Kegiatan teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

#### I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

#### II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

#### III. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

#### IV. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/KotaKegiatan Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi
  - a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

#### V. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/KotaKegiatan Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

**Tabel 3.3**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

I	Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (EPPD /OUTCOME)						
					5%	1,275,000,000	APBD	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi			1			
	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Raperwali RUPM Kota Balikpapan	<b>Input :</b>		1	900,000,000	APBD	
			1. SDM	Orang	7			
			2. Dana	Rp	900,000,000			
			3. Sarana Prasarana	Paket	1			
			4. Waktu	Bulan	6			
			<b>Output (Keluaran) :</b>					
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi RUPM dan dokumen Raperwali RUPM	Triwulan	4			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
Tersusunya Raperwali RUPM Kota Balikpapan	Raperwali	1						
	2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal	<b>Input :</b>		1	375,000,000	APBD	
			1. SDM	Orang	7			
			2. Dana	Rp	375,000,000			
			3. Sarana Prasarana	Paket	1			
			4. Waktu	Bulan	6			
			<b>Output (Keluaran) :</b>					
			Tersedianya Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal	Dokumen	1			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha di Kota Balikpapan	Dokumen	1						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kegiatan			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Satuan	Target			
II	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah			5%	850,000,000	APBD	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah bahan-bahan informasi potensi penanaman modal (Jumlah Jenis Sarana Promosi)	<b>Input :</b>		8	250,000,000	APBD	
			1. SDM	Orang	8			
			2. Dana	Rp	250,000,000			
			3. Sarana Prasarana	event	4			
			4. Waktu	bulan	10			
			<b>Output (Keluaran) :</b>					
			Jumlah Jenis Bahan Informasi poetensi Penanaman Modal	Jenis	4			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
			Terpromosinya Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Balikpapan	Persen	100			
	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Pameran Promosi Investasi Dalam Negeri (Kali)	<b>Input :</b>		8	600,000,000	APBD	
			1. SDM	Orang	8			
			2. Dana	Rp	600,000,000			
			3. Sarana Prasarana	event	4			
			4. Waktu	bulan	10			
			<b>Output (Keluaran) :</b>					
			Frekuensi Pameran Promosi Investasi Dalam Negeri	Kegiatan	4			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
			Terpromosinya Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Balikpapan	Persen	100			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kegiatan			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Satuan	Target			
III	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Nilai realisasi penanaman modal</b>			<b>3,328 T</b>	<b>300,000,000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi LKPM (APBD)	<b>Input :</b>		1	300,000,000	APBD	
			1. SDM	Orang	10			
			2. Dana	Rp	300,000,000			
			3. Sarana Prasarana	Kegiatan	1			
			4. Waktu	Bulan	6			
			<b>Output (Keluaran) :</b>					
			Terselenggaranya Sosialisasi LKPM Online (Untuk PMA PMDN Kota Balikpapan)	Kali	2			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
			Meningkatnya Penyampaian LKPM Online	Persen	100			
IV	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Skor SKM Pelayanan Perizinan</b>			<b>89</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan berusaha yang divalidasi			3000	2,000,000,000		
		Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	<b>Input :</b>		6200	1,000,000,000	APBD	Pengadaan ATK, Blangko Cetak Izin
			1. SDM	Orang	18			
			2. Dana	Rp.	1,000,000,000			
			3. Sarana Prasarana	Jenis	80			
			4. Waktu	Bulan	12			
			<b>Output (Keluaran) :</b>					
			Jumlah Perizinan yang diterbitkan	Dokumen	6,200			
			Jumlah Penyediaan Tenaga Non PNS	Orang	18			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
			Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan	Persen	100			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kegiatan			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Satuan	Target			
	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dipantau	<b>Input :</b>		100	500,000,000		
			1. SDM	Orang	22			
			2. Dana	Rp	500,000,000			
			3. Sarana Prasarana	Jenit	67 Jenis			
			4. Waktu	Bulan	12			
			<b>Output (Keluaran) :</b>					
			Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen	Bulan	12			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan	Persen	100					
	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal  Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Pelayanan Perizinan keliling	<b>Input :</b>		9600	500,000,000		
			1. SDM	Orang	22			
			2. Dana	Rp	500,000,000			
			3. Sarana Prasarana	Kali	1			
			4. Waktu	Bulan	12			
<b>Output (Keluaran) :</b>								
Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Kali	1				
Jumlah Pelayanan Perizinan Keliling			Kali	48				
<b>Outcome (Hasil) :</b>								
Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan	Persen	100						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kegiatan			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Satuan	Target			
V	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha			10 jenis Perizinan	1,000,000,000	APBD	
-	<p><b>Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota</b></p> <p>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p><b>Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi</b></p> <p>Jumlah Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi</p> <p>Jumlah pengembangan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan</p> <p>Tersosialisasinya Perizinan dan Investasi (3 Paket, Jenis Media, Jumlah Undangan dan Pelaksanaan Uji Publik)</p> <p>Jumlah Jenis Media Publikasi Perizinan dan Investasi</p>	<p><b>Input :</b></p> <p>1. SDM</p> <p>2. Dana</p> <p>3. Sarana Prasarana</p> <p>4. Waktu</p> <p><b>Output (Keluaran) :</b></p> <p>Pengembangan dan Pemeliharaan Berbasis Software / Aplikasi (Software), Tersosialisasinya perizinan dan non perizinan</p> <p><b>Outcome (Hasil) :</b></p> <p>Meningkatnya Pengetahuan dan informasi Masyarakat tentang Perizinan dan non perizinan</p>	<p>Jenis Media</p> <p>Orang</p> <p>Rp</p> <p>Paket</p> <p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>Persen</p>	<p>12 bulan</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>1,000,000,000</p> <p>13</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>100</p>	<p>1,000,000,000</p> <p>1,000,000,000</p>	<p>APBD</p> <p>APBD</p>	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kegiatan			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Satuan	Target			
VI	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah</b>			<b>90%</b>	<b>4,292,500,000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</b> 1. Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Jenis Komponan listrik yang diadakan	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu	Orang Rp Jenis Bulan	4 20 35,000,000 10 12	<b>1,835,000,000</b> 35,000,000	APBD	
			<b>Output (Keluaran) :</b>					
		Jumlah Jenis Komponen listrik yang diadakan		Jenis	6			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
		Meningkatnya kualitas Pelayanan publik		persen	100			
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang diadakan	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu	Orang Rp Unit Usaha Bulan	4 20 1,000,000,000 140 12	1,000,000,000	APBD	
		Jumlah Jenis Peralatan yang diadakan	<b>Output (Keluaran) :</b>					
		Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang diadakan		Jenis	3			
		Jumlah Jenis Peralatan yang diadakan		Jenis	10			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
		Meningkatnya kualitas Pelayanan publik		persen	100			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kegiatan			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting			
			Indikator Kinerja	Satuan	Target						
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang diadakan	<b>Input :</b>		4	350,000,000	APBD				
		Jumlah Peserta/Undangan/Orang yang disiapkan makan dan minum pada pelaksanaan rapat/tamu	1. SDM	Orang	20						
			2. Dana	Rp	350,000,000						
			3. Sarana Prasarana	Paket	3						
			4. Waktu	Bulan	12						
			<b>Output (Keluaran) :</b>								
			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang diadakan	Jenis	60						
			Jumlah Peserta/Undangan/Orang yang disiapkan makan dan minum pada pelaksanaan rapat/tamu	Orang	30000						
			<b>Outcome (Hasil) :</b>								
			Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	persen	100						
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	<b>Input :</b>		3	100,000,000	APBD				
			1. SDM	Orang	7						
			2. Dana	Rp.	100,000,000						
			3. Sarana Prasarana	Jenis	3						
			4. Waktu	Bulan	12						
				<b>Output (Keluaran) :</b>							
				Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	Jenis				3		
	<b>Outcome (Hasil) :</b>										
	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	persen	100								

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kegiatan			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting		
			Indikator Kinerja	Satuan	Target					
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan keluar daerah (orang)	<b>Input :</b>		4	350,000,000	APBD			
			1. SDM	Orang	20					
			2. Dana	Rp	350,000,000					
			3. Sarana Prasarana	Orang	60					
			4. Waktu	Bulan	12					
			<b>Output (Keluaran) :</b>							
Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan keluar daerah	Orang	60								
	2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan	<b>Output (Hasil) :</b>			0	APBD			
			Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	persen	100					
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan	<b>Input :</b>		1000	0	APBD			
			1. SDM	Orang	5					
			2. Dana	Rp.	-					
			3. Sarana Prasarana	Jenis	2					
			4. Waktu	Bulan	12					
			<b>Output (Keluaran) :</b>							
Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan	Unit	0								
			<b>Output (Hasil) :</b>							
			Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	persen	100					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kegiatan			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Satuan	Target			
	<b>3. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>					<b>1,857,500,000</b>		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Materai dan benda pos lainnya	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu	Orang Rp. Paket Bulan	3 7 7,500,000 1 12	7,500,000	APBD	
			<b>Output (Keluaran) :</b>					
			Jumlah Perangko, Materai, dan benda pos lainnya	Lembar	1000			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
			Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	persen	100			
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu	Orang Rp. Paket Bulan	18 13 750,000,000 2 12	750,000,000	APBD	
			<b>Output (Keluaran) :</b>					
			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Jenis	3			
			<b>Outcome (Hasil) :</b>					
			Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	persen	100			

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kegiatan			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target				
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat dan Jasa Kebersihan yang diadakan, Jumlah THL/Naban	<b>Input :</b>		2	1,100,000,000	APBD	Lelang Untuk Pengadaan Jasa Cleaning service bahan kebersihan serta Jasa Keamanan	
			1. SDM	Orang	6				
			2. Dana	Rp.	1,100,000,000				
			3. Sarana Prasarana	Paket	1				
			4. Waktu	Bulan	12				
			<b>Output (Keluaran) :</b>						
			Jumlah jenis alat dan jasa kebersihan yang diadakan	Jenis	2				
			Jumlah Penyediaan Tenaga Non PNS	Orang	13				
			<b>Outcome (Hasil) :</b>						
			Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	persen	100				
	4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diurus perpanjangan STNKnya			600,000,000	APBD			
		Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan Pembelian BBM Genset			350,000,000				
		<b>Input :</b>		60					
		1. SDM	Orang	7					
		2. Dana	Rp.	350,000,000					
		3. Sarana Prasarana	Jenis	1					
		4. Waktu	Bulan	12					
		<b>Output (Keluaran) :</b>							
		Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diurus perpanjangan STNKnya	Unit	24					
		<b>Outcome (Hasil) :</b>							
Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	persen	100							

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kegiatan			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting			
			Indikator Kinerja	Satuan	Target						
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang dipelihara	<b>Input :</b>		3	250,000,000	APBD				
		Jumlah Jenis Peralatan yang dipelihara	1. SDM	Orang	7						
			2. Dana	Rp.	250,000,000						
			3. Sarana Prasarana	Jenis	3						
			4. Waktu	Bulan	12						
			<b>Output (Keluaran) :</b>		s						
			Tersedianya Jumlah Jenis Alat Perlengkapan dan peralatan yang dipelihara	Jenis	8						
	<b>Outcome (Hasil) :</b>										
	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	persen	100								
<b>JUMLAH</b>						<b>9,717,500,000</b>					

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DPMPT KOTA BALIKPAPAN**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) disusun berdasarkan tabel sebagai berikut :

URUSAN	KODE				Program/Kegiatan Sesuai Permendagri 050/3708	Indikator Program/Kegiatan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		Bidang Pengampu
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2022 (Tahun Ke-1)		
							target	Rp	
2	18				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	5	1,275,000,000	Bidang Penanaman Modal
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-			
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-			
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	1	1,275,000,000	Seksi Administrasi PM
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Raperwali RUPM Kota Balikpapan	1	300,000,000	
						Jumlah Sosialisasi RUPM	4	600,000,000	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal	1	375,000,000	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan Sesuai Permendagri 050/3708	Indikator Program/Kegiatan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		Bidang Pengampu
							2022 (Tahun Ke-1)		
							target	Rp	
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah (%)</b>	<b>5</b>	<b>850,000,000</b>	<b>Bidang Penanaman Modal</b>
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah (UnitUsaha)	4	850,000,000	Seksi Promosi PM
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah bahan-bahan informasi potensi penanaman modal ( Jenis Sarana Promosi)	4 Jenis (Video, Pamflet, Banner dan Brosur)	250,000,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pameran Penanaman Modal (Jumlah even pameran)	4 Pameran (Luar Daerah =2; Dalam daerah= 2)	600,000,000	

KODE					Program/Kegiatan Sesuai Permendagri 050/3708	Indikator Program/Kegiatan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		Bidang Pengampu
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2022 (Tahun Ke-1)		
							target	Rp	
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai realisasi penanaman modal (Triliun Rp.)</b>	<b>3,328</b>	<b>300,000,000</b>	<b>Bidang Penanaman Modal</b>
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal (LKPM)	153		Seksi Dalak PM
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi LKPM (Kali)	2	300,000,000	
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha (Jenis Perizinan)</b>	<b>10</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>Bidang PLIK</b>
2	18	06	2.01		Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi (Bulan)	12	1,000,000,000	Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan & Seksi Analisa Kebijakan dan Penyuluhan
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi (Jenis)	3	1,000,000,000	
						Jumlah pengembangan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan (Aplikasi)	5		
						Jumlah pemeliharaan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan (Aplikasi)	5		
						Jumlah Jenis Media Publikasi Perizinan dan Investasi (Jenis)	3		

KODE					Program/Kegiatan Sesuai Permendagri 050/3708	Indikator Program/Kegiatan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		Bidang Pengampu
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2022 (Tahun Ke-1)		
							target	Rp	
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Skor SKM Pelayanan Perizinan</b>	<b>89.00</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>Bidang Perizinan Usaha, PPR dan PLIK</b>
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan berusaha yang divalidasi		2,000,000,000	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	6200	1,000,000,000	Bidang Perizinan Usaha dan Bidang PPR
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dipantau	3000	500,000,000	Bidang Perizinan Usaha dan Bidang PPR
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal (Dokumen)	9600	500,000,000	Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi
						Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (Kali)	1		
						Jumlah Pelayanan Perizinan keliling (Kali)	48		

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			Program/Kegiatan Sesuai Permendagri 050/3708	Indikator Program/Kegiatan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		Bidang Pengampu
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2022 (Tahun Ke-1)		
							target	Rp	
2	18	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah		4,292,500,000	Bidang Sekretariat
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah (Jenis)	5	1,835,000,000	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis)	9	35,000,000	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor (jenis)	13	1,000,000,000	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor (Jenis)	3	350,000,000	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	3	100,000,000	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah (kali)	60	350,000,000	

KODE					Program/Kegiatan Sesuai Permendagri 050/3708	Indikator Program/Kegiatan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		Bidang Pengampu
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2022 (Tahun Ke-1)		
							target	Rp	
2	18	01	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD (Jenis)	0	-	Bidang Sekretariat
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (unit)	0	-	
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang (Jenis)	3	<b>1,857,500,000</b>	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat (Jenis)	1000	7,500,000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	3	750,000,000	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan (m2)	3984.5	1,100,000,000	
2	18	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD (jenis)	3	<b>600,000,000</b>	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara (unit)	18	350,000,000	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Jenis)	8	250,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>9,717,500,000</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2022 merupakan implementasi dari perencanaan strategis yang ditetapkan dan tersusun sebagai penjabaran dari tahapan-tahapan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, baik kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik menyatu dan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan pada input, output, outcome, benefit dan impact sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, skala prioritas serta anggaran yang tersedia.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis;
4. Kontribusi pelaku usaha di segala sektor ekonomi di Kota Balikpapan dalam membantu meningkatkan Investasi dan berpengaruh luas pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berimbas pada makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya agar selalu dikembangkan yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Balikpapan, 19 Maret 2021

Kepala DPMPT Kota Balikpapan,



**Drs. Elvin Junaidi, M.Si**